JEP

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Tanjung Pura-Kabupaten Langkat

Ade Rahma Ayu Siregar, Ramli, Rujiman

Analisis Pengaruh Pasar, Transportasi, Teknologi Dan Kelembagaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Serdang Bedagai

Abdul Razak, Ramli, Sya'ad Afifuddin

Analisis Keterkaitan Investasi Sektor Pertanian Di Indonesia Dengan Pendekatan Vector Auto Regresion

Zulfikri Tarmizi, Rahmanta, Sya'ad Afifuddin

Analisis Pengaruh Bantuan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Pedagang Pakaian Di Kota Medan

Hafizal Azhar, Ramli, H.B. Tarmizi

Analisis Pemanfaatan Sarana Infrastruktur Desa Terhadap Produktivitas Masyarakat Desa Di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

Budi Mulia Warman Harahap, Ramli, Rujiman

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota, Icor, Investasi Terhadap Perekonomian Daerah Kota Tebing Tinggi

Moch. Ilham, Ramli, Sya'ad Afifuddin

Jurnal Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara

ISSN : 2338-2600

Volume 2 Nomor 3, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Tanjung Pura-Kabupaten Langkat Ade Rahma Ayu Siregar, Ramli, Rujiman	143 – 152
Analisis Pengaruh Pasar, Transportasi, Teknologi Dan Kelembagaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Serdang Bedagai Abdul Razak, Ramli, Sya'ad Afifuddin.....	153 – 161
Analisis Keterkaitan Investasi Sektor Pertanian Di Indonesia Dengan Pendekatan Vector Auto Regresion Zulfikri Tarmizi, Rahmanta, Sya'ad Afifuddin.....	162 – 169
Analisis Pengaruh Bantuan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Pedagang Pakaian Di Kota Medan Hafizal Azhar, Ramli, H.B. Tarmizi	170 – 179
Analisis Pemanfaatan Sarana Infrastruktur Desa Terhadap Produktivitas Masyarakat Desa Di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Budi Mulia Warman Harahap, Ramli, Rujiman	180 – 190
Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota, Icor, Investasi Terhadap Perekonomian Daerah Kota Tebing Tinggi Moch. Ilham, Ramli, Sya'ad Afifuddin	191 – 197

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN
TANJUNG PURA-KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ade Rahma Ayu Siregar, Ramli, Rujiman

ABSTRACT : *Small and medium enterprises (SME) is one of the business sectors which needs very much spesial attention from the government due to its role as the catalisator in the economic growth in Indonesia and its ability to cope with poverty and unemployment. In this context, the government has issued various policies supporting the Indonesian SME's development and productivity improvement which have been stipulated in legislation and government regulation. The purpose of this study was about the influence of local government policy in providing assistance in the forms of working capital, training, technology, access of information, and marketing of the profit of SME business in Tanjung Pura Subdistrict, Langkat District, Sumatera Utara Province. The data for this were obtained through interviews with all of the respondents comprising the SME practitioners selected through census sampling technique. The data obtained were analyzed through multiple regression using General Linear Models (GLM) because the data used varied. Partially, the result of the study showed that working capital and marketing had a positive and significant influence on the SME profit, while training, technology and access of information had a negative and insignificant influence on the SME profit. Simultaneously, the result of this study showed that working capital, training, technology, access of information, and marketing had influence on the SME profit. The result of study mentioned above reveals that the efforts of government to encourage the SME development and productivity improvement has not optimally met.*

Keywords : *Capital, Training, Technology, Information Access, Marketing, Profit, SME*

A. Latar Belakang

Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian ASEAN *Economic Community* (AEC) atau pasar tunggal ASEAN 2015 yang berdaya saing dan berperan aktif dalam ekonomi global. Indonesia sebagai salah satu negara yang akan menghadapi pasar tunggal 2015, harus mampu menciptakan daya saing dari berbagai sektor ekonomi. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar memiliki daya saing yang tinggi baik dari segi kualitas maupun harga. UKM diharapkan dapat bertahan dan menjadi produk unggulan dan menjadi primadona

dalam pasar tunggal ASEAN 2015 mendatang.

Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi "penonton" pada arus ekonomi pasar tunggal, tetapi turut serta dalam memberikan kontribusi produk kepada negara-negara MEA. UKM merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian

yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak

sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia.

Tabel 1.1 Struktur PDB Menurut Skala Usaha Dan Sektor 2008 (%)

Sektor	UMK	UM	UB	Total
Pertanian	87,37	8,57	4,06	100,00
Pertambangan	10,52	2,07	87,41	100,00
Industri Manufaktur	18,86	12,01	69,31	100,00
Listrik, gas, dan air	1,36	6,87	91,77	100,00
Bangunan	16,37	21,47	62,16	100,00
Perdagangan, hotel & restoran	83,41	12,62	4,07	100,00
Transportasi & komunikasi	25,40	15,81	58,79	100,00
Keuangan & eceran	21,19	42,45	36,36	100,00
Jasa-jasa	83,50	12,00	4,50	100,00

Sumber : Menekop & UKM (www.depkop.go.id) dan BPS (www.bps.go.id)

Hal ini membuktikan bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada.

Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian.

Sumber : Menekop & UKM (www.depkop.go.id) dan BPS (www.bps.go.id)

Gambar 1.1 Struktur PDB Menurut Skala Usaha dan Sektor 2008 (%)

Dari segi nilai ekspor nasional (BPS, 1998), Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain, seperti Taiwan (65%), China (50%), Vietnam (20%), Hongkong (17%), dan Singapura (17%). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti

antara lain: perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan

hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Koperasi dan UKM. Namun, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri.

UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UKM dalam perekonomian. Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat.

Saat ini peran UKM nampak belum begitu dirasakan, karena kurangnya kekuatan bersaing dengan produk-produk luar negeri, dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Kita harus melihat ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama. Ada tiga alasan utama kenapa suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk

terus berkembang. Alasan *pertama* adalah karena pada umumnya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian untuk alasan yang *kedua*, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan jaman. Untuk alasan yang *ketiga*, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal *fleksibilitas* dibandingkan dengan perusahaan besar.

Selama ini kenyataan di lapangan ternyata masih banyak para pelaku usaha yang belum menerapkan konsep manajemen seperti ini dalam operasional usaha mereka sehari-hari. Sebagai pihak yang mengucurkan pinjaman (*kreditur*), lembaga keuangan tentunya akan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi diri dari resiko kerugian sebagai akibat dari kredit macet. Selain itu, tingginya bunga kredit yang diberikan serta berbelitnya prosedur pengajuan menyebabkan sebagian besar usaha kecil tidak mengajukan kredit kepada lembaga keuangan bank maupun non bank seperti pasar modal dan lembaga pembiayaan. Sekarang, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ini karena bagaimanapun juga, usaha kecil merupakan bagian terkecil dari perekonomian Indonesia dan tanpanya Indonesia sulit untuk maju.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi

karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* bagi pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangannya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan.

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun non-bank, melakukan berbagai upaya

untuk mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha serta upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UKM.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah modal berpengaruh positif terhadap profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura ?
2. Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura ?
3. Apakah teknologi berpengaruh positif terhadap profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura ?
4. Apakah akses informasi berpengaruh positif terhadap profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura ?
5. Apakah pemasaran berpengaruh positif terhadap profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh modal, pelatihan, teknologi, akses informasi, pemasaran terhadap pertumbuhan profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura. Objek penelitian ini adalah UKM Dodol yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten

langkat, Provinsi Sumatera Utara. Jenis data dalam penelitian adalah data kuantitatif dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner dan wawancara. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Maret sampai April 2013.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelaku UKM produk dodol yang berada di Kecamatan Tanjung Pura yang hasil usahanya mampu berkembang dan bertahan hingga penelitian ini dilakukan yaitu sebanyak 33 (responden) UKM. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data secara sensus dikarenakan jumlah objek yang terbatas sehingga yang menjadi responden adalah seluruh pelaku UKM produk dodol yang ada di Kecamatan Tanjung Pura.

Menurut Sarwono (2012), model-model gabungan linear (*Linear Mixed Models*) merupakan bentuk perluasan dari GLM (*General Linear Models*) yang memungkinkan data menunjukkan variabilitas yang berkorelasi dan tidak konstan. Model ini memberikan fleksibilitas dalam pembuatan model yang tidak hanya didasarkan pada data, tetapi juga pada varians dan kovarians. Syarat-syarat data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data harus berdistribusi normal
2. Variabel tergantung harus kuantitatif, berskala non-metrik dan berskala nominal
3. Kovariat harus kuantitatif, berskala metrik dan setidaknya berskala interval
4. Variabel pembobot harus kuantitatif, berskala metrik dan setidaknya berskala interval.

Penelitian ini menggunakan *linear mixed models* untuk mengetahui pengaruh modal, pelatihan, teknologi, akses informasi, dan pemasaran terhadap pertumbuhan profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura. Adapun fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

Y = Profit UKM

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = Koefisien masing – masing variabel

X_1 = Modal

X_2 = Pelatihan

X_3 = Teknologi

X_4 = Akses informasi

X_5 = Pemasaran

e = Tingkat kesalahan

Definisi Operasional Variabel meragamkan persepsi dalam penulisan ini, maka disajikan beberapa definisi operasional yang diuraikan sebagai berikut :

1. Profit UKM merupakan keuntungan/pendapatan yang diperoleh UKM yang diukur dalam rupiah.
2. Modal adalah jumlah investasi yang dilakukan UKM, baik secara mandiri maupun melalui lembaga keuangan lainnya yang diukur dalam rupiah.
3. Pelatihan adalah berbagai kegiatan baik berupa penyuluhan, sosialisasi, *workshop*, seminar dan hal lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku UKM yang diukur dalam frekuensi.
4. Teknologi terkait dengan program pemerintah dalam memberikan bantuan teknologi yang dimasukkan untuk meningkatkan profit UKM yang diukur dalam skala linkert.
5. Akses informasi merupakan jaringan informasi yang dibuat dalam rangka mempermudah, memfasilitasi dan menyebarluaskan informasi tentang bisnis/usaha yang diukur dalam skala linkert.
6. Pemasaran merupakan kegiatan menyalurkan dan menjualkan hasil

produksi kepada pihak konsumen yang diukur dalam skala linkert.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil estimasi data penelitian menunjukkan persamaan penelitian sebagai berikut : $Y = 4105.579 + 1.558X_1 - 254.756X_2 - 52.311X_3 - 362.008X_4 + 824.744X_5$

Dari persamaan diatas diketahui bahwa :

- Konstanta memiliki nilai sebesar 4105,579 mengartikan bahwa modal, pelatihan, teknologi, akses informasi atau pemasaran pada UKM mempengaruhi profit UKM sebesar 4105.579 rupiah.
- Hasil besaran koefisien regresi β_1 sebesar 1,558 X_1 pada penelitian ini diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan modal sebesar 1 rupiah maka akan mempengaruhi profit UKM sebesar 1.558 rupiah. Dimana variabel modal (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit UKM (Y), dimana $t\text{-sig} < \alpha = 0,05$ ($0,00 < 0,05$) yang berarti menerima H_a dan menolak H_o .
- Nilai besaran koefisien β_2 sebesar -254,756 pada penelitian ini diartikan bahwa apabila frekuensi pelatihan berkurang, maka akan mempengaruhi profit UKM sebesar 254,756 rupiah. Dimana variabel pelatihan (X_2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profit UKM (Y), dimana $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$ ($0,451 > 0,05$) yang berarti menerima H_o dan menolak H_a .
- Koefisien regresi β_3 sebesar -52,311 pada penelitian ini diartikan bahwa jika terjadi penurunan pada teknologi maka akan mempengaruhi profit UKM sebesar 52,311 rupiah. Dimana variabel teknologi (X_3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profit UKM (Y), dimana $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$

($0,129 > 0,05$) yang berarti menerima H_o dan menolak H_a .

- Koefisien regresi β_4 sebesar -362,008 pada penelitian ini diartikan bahwa jika terjadi penurunan pada akses informasi maka mempengaruhi profit UKM sebesar 362,008 rupiah. Dimana variabel akses informasi (X_4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profit UKM (Y), dimana $t\text{-sig} < \alpha = 0,05$ ($0,982 < 0,05$) yang berarti menerima H_o dan menolak H_a .
- Besaran koefisien regresi β_5 sebesar 824,744 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan pemasaran maka akan mempengaruhi profit UKM sebesar 824,744 rupiah. Dimana variabel pemasaran (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit UKM (Y), dimana $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$ ($0,002 > 0,05$) yang berarti menerima H_a dan menolak H_o .

Berdasarkan Pembahasan dari hasil estimasi diketahui bahwa modal dan pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanta 2011 yang menemukan bahwa modal dan pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM Kerajinan Di Klaten.

Sementara pelatihan, teknologi dan akses informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan profit UKM di Kecamatan Tanjung Pura. Jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, dapat diartikan bahwa pemerintah belum menjalankan peran, tugas dan fungsinya secara optimal didalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan serta kemampuan daya saing usaha.

UKM merupakan salah satu sektor usaha yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai *katalisator* pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya (BPS, 2009). Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 dan kemudian disempurnakan lagi dengan disahkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

Sektor *finansial* atau permodalan sering dikatakan sebagai hambatan utama (*klasik*) dalam perkembangan UKM di Indonesia. Pemerintah, perbankan maupun swasta merupakan pihak yang sangat penting untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan UKM di Indonesia. Peran perbankan tidak hanya dalam bentuk pendanaan melalui skema-skema khusus tetapi juga sekaligus "memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan proses produksi dan pemasaran.

Modal kerja (*working capital*) hingga saat ini masih dijadikan sebagai indikator utama dalam pertumbuhan profit usaha, namun beberapa pendapat membantah teori ini. Modal dianggap tidak dapat menjamin bahwa suatu usaha dapat memperoleh profit yang maksimal, modal hanya merupakan komponen *aktiva tetap* yang digunakan untuk membiaya kegiatan produksi. Namun berbagai pendapat tersebut tetap saja belum dapat mengatasi masalah permodalan UKM di Indonesia.

Sektor permodalan merupakan masalah klasik yang sering dijadikan oleh pelaku UKM untuk berlindung dari ketidakmampuannya dalam berinovasi dan berkembang menjadi UKM yang

mandiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 33 responden, ditemukan bahwa sumber modal terbesar pada UKM bukan berasal dari sektor keuangan formal seperti perbankan ataupun lembaga keuangan mikro lainnya, tetapi mereka memperoleh modal usahanya dari modal sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, lembaga keuangan formal dan swasta belum dapat memaksimalkan fungsinya sebagai *leggal funding* bagi UKM, hasil tersebut juga mengartikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyediakan bantuan permodalan bagi UKM belum terealisasi secara konkrit.

Perkembangan UKM di negara sedang berkembang, seperti Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai hambatan. Hambatan tersebut berbeda-beda antara satu UKM dengan UKM lainnya, yang berbeda daerah, berbeda keahlian, berbeda pengetahuan dan berbeda jenis produknya. Rintangan-rintangan tersebut diantaranya adalah kemampuan alih (penggunaan) teknologi dan kualitas SDM yang relatif masih rendah.

Dalam menghadapi MEA, tentunya pelaku UKM harus dibekali dengan kemampuan berinovasi dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menghasilkan produk bermutu tinggi dan dapat berkompetensi dengan produk-produk asing yang nantinya akan masuk dengan bebas ke *market* Indonesia. Untuk menciptakan UKM Indonesia sebagai *kompetitor* yang tangguh, tentunya dibutuhkan UKM yang kreatif dan mandiri. Salah satu jalannya adalah dengan membekali UKM Indonesia dengan penguasaan terhadap teknologi produksi yang dapat meningkatkan profitnya.

Suatu usaha dianggap bermutu apabila dapat menghasilkan keuntungan bisnis/profit, keuntungan negara dan keuntungan sosial/masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, kualitas produk, dan promosi. Variabel-variabel tersebut dapat dijadikan indikator alternatif untuk mengukur besarnya profit usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan teknologi sangat diperlukan dalam mengukur besarnya profit usaha. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para pelaku UKM membutuhkan bantuan dalam bentuk mesin-mesin/peralatan berteknologi tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Peran pemerintah daerah dalam memberikan akses informasi bagi UKM pada kenyataannya belum sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh responden mengaku bahwa peran pemerintah, khususnya dalam memberikan akses informasi, tidak berpengaruh terhadap perkembangan profit usaha mereka. Pemerintah tidak pernah memberikan bantuan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pasar (*market*), peluang-peluang usaha, maupun pengembangan usaha. Pelaku UKM berharap pemerintah daerah membantu mereka dalam memberikan akses-akses dan informasi usaha yang diharapkan dapat membantu mereka dalam meningkatkan profit usaha.

Hingga saat ini, daya saing UKM Indonesia masih rendah dan belum mampu bersaing dengan produk-produk impor sejenisnya. Beberapa alasannya adalah :

1. Kualitas produk UKM lebih rendah dibanding dengan produk impor karena rendahnya teknologi, rendahnya kualitas SDM dan minimnya kegiatan pelatihan.
2. Tingkat efisiensi dalam proses produksi yang rendah.
3. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang lebih menguntungkan produk-produk impor.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing adalah melakukan inovasi-inovasi produk dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang berorientasi terhadap peningkatan daya saing produk dan profit UKM. Pelatihan merupakan cara yang paling tepat dan efektif untuk membantu UKM dalam meningkatkan kualitas produknya.

Variabel lainnya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah orientasi pasar (*market orientation*). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hanya sedikit dari jumlah responden yang wilayah pemasarannya melayani pasar lokal dan luar daerah. Namun disisi lain juga sangat sedikit sekali yang orientasi pasarnya melayani pasar lokal, luar daerah dan supermarket/pasar. Kebanyakan dari para responden hanya memasarkan produknya di pasar lokal.

Kemampuan seorang pengusaha dalam menentukan target pasarnya ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk wawasannya mengenai pasar yang ingin dicapai, jaringan/*social networking* keunggulan produk (cita rasa) dan lainnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membantu pemasaran sangat rendah. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang memasarkan sendiri produknya tanpa ada campur tangan pemerintah setempat. Mereka berpendapat bahwa hingga saat ini pemerintah tidak pernah membantu mereka dalam hal pemasaran.

Namun berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa kebijakan pemerintah di dalam memberikan bantuan pelatihan, teknologi dan akses informasi terhadap UKM tidak berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Sebagian besar responden mengaku bahwa modalnya berasal dari modal sendiri. Responden mengakui

bahwa pemerintah tidak pernah memberikan bantuan modal kepada mereka. Pemerintah juga jarang sekali mengadakan pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, maupun *workshop* bagi UKM. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan pertumbuhan profit usaha.

Kecenderungan dari responden masih menggunakan teknologi tradisional dan mempertahankan metode-metode lama yang mereka ketahui keluarga dalam menghasilkan citarasa produknya sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas dan variasi produk. Pengetahuan dan ketrampilan mereka yang masih minim di dalam mengolah dan menghasilkan produk yang bervariasi dengan citarasa yang sesuai dengan segmentasi pasar (konsumen) disebabkan oleh rendahnya frekuensi pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, maupun *workshop* yang mereka dapatkan, terutama dari pemerintah setempat di dalam mengolah produk.

Akses yang bersifat terbuka bagi pelaku usaha dengan memfasilitasi segala informasi usaha merupakan langkah yang tepat dalam mendukung pengembangan usaha. Responden mengaku bahwa mereka tidak memiliki akses dalam mendapatkan informasi mengenai peluang pasar khususnya di luar wilayah mereka. Meski kesulitan pemasaran bukan merupakan kendala utama responden, namun mereka tetap mengharapkan bantuan pemerintah dalam pemasaran dan akses informasi.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan profit usahanya, responden mengharapkan bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, teknologi, akses informasi dan pemasaran agar usaha mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai usaha yang mandiri secara finansial, *akuntabel* dan berdaya saing ekspor. Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 ditetapkan bahwa UKM sektor usaha yang mempunyai

kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkembang. Undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan peran, tugas dan fungsi pemerintah dalam mendukung pengembangan dan pertumbuhan UKM di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah diharuskan membuat kebijakan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan UKM dimana tujuannya adalah meningkatkan pendapatan usaha (*profit*) dan berdaya saing ekspor. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :

- a. Pembiayaan, penyediaan dana (modal usaha), melalui Bank, koperasi, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan bukan Bank.
- b. Melakukan pemberdayaan, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, maupun *workshop* untuk memberikan keterampilan dan menciptakan daya saing UKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam upaya membantu pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas dalam bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta melakukan pendampingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UKM.
- d. Membangun kemitraan dan kerjasama usaha antara UKM dengan pemerintah, masyarakat maupun investor atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

Undang-undang No.20 Tahun 2008 telah mengatur secara konkrit peran, tugas dan fungsi pemerintah dalam mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia. Apabila semua peran, tugas dan fungsi tersebut dapat

dipenuhi dan dijalankan oleh pemerintah secara optimal, maka pertumbuhan dan pengembangan sektor UKM di Indonesia sebagai sektor usaha yang berorientasi ekspor dan mandiri secara finansial dapat dicapai serta meningkatkan pendapatan perkapita melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkesinambungan.

E. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan penting mengenai peran pemerintah terhadap UKM. Berdasarkan uji parsial yang ditunjukkan oleh hasil uji-T diketahui bahwa :

1. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit UKM.
2. Pelatihan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profit UKM.
3. Teknologi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profit UKM.
4. Akses informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profit UKM.
5. Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit UKM.

Berdasarkan uji serempak yang ditunjukkan oleh hasil uji-F dan nilai R^2 diketahui bahwa modal, pelatihan,

teknologi, akses informasi dan pemasaran mempengaruhi profit UKM.

DAFTAR PUSTAKA

Sarwono, Jonathan. 2012. *Advanced Statistic, Prosedur-Prosedur Generalisasi dan Perluasan General Linear Model (GLM)*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Siswanta, Lilik. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Genteng Di Klaten*. AKMENIKA-Universitas Pendidikan Yogyakarta. Yogyakarta.

www.undp.or.id . 2005. Kajian Tematis : *Pembangunan Ekonomi Lokal, Sumber Daya Alam Dan Penghidupan*.

<http://www.ikopin.ac.id>.

www.depkip.go.id.

www.bps.go.id

BPS Kabupaten Langkat 2008-2009.

BPS Sumatera Utara 2008-2009.